

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021**

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan indikator kinerja program, strategi pembangunan, kebijakan, program dan sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam lima tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan lokal, nasional maupun global. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Rencana strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum sumber daya yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kota Depok, seperti sumber daya keuangan, budaya kerja dan SDM, serta prasarana dan sarana;
2. Menyusun dokumen guna menentukan prioritas kebijakan yang memuat landasan yang koheren dan kokoh sebagai acuan penyusunan strategi, sasaran, program

dan kegiatan guna perbaikan kinerja Badan Keuangan Daerah sesuai Perubahan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok.

3. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Keuangan Daerah dalam lima tahun ke depan; dan
4. Menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Badan Keuangan Daerah untuk periode lima tahun ke depan.

#### 2.1.1. VISI

Visi Badan Keuangan Daerah Kota Depok disusun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada serta mempertimbangkan budaya organisasi. Pernyataan Visi adalah pernyataan yang menggambarkan keberhasilan serta citra yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah yaitu **"Menjadi Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset yang Transparan dan Akuntabel"**. Hal ini berarti bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Depok akan mengelola pendapatan, keuangan dan aset secara jujur, transparan, dan taat azas dengan hasil yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, serta sepenuhnya didedikasikan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Depok.

Sehubungan dengan telah disusunnya Perubahan RPJMD Kota Depok Tahun 2016 – 2021 dan sesuai dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 maka Visi Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Visi Kota. Sehingga pada Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2016 – 2021 dilakukan perubahan visi sesuai dengan Visi Kota Depok sebagai berikut :

VISI BADAN KEUANGAN DAERAH	
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Menjadi Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset yang Transparan dan Akuntabel	Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius

#### 2.1.2. MISI

Pernyataan Misi adalah pernyataan tentang bagaimana mewujudkan visi, apa yang akan dilakukan dan bagaimana hasil yang akan dicapai. Dengan memperhatikan

tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, dirumuskan misi Badan Keuangan Daerah Kota Depok yaitu sebagai berikut :

**1. Membangun dan Mengembangkan BKD menjadi Lembaga yang Profesional.**

Misi ini mengandung makna bahwa Badan Keuangan Daerah bertekad untuk senantiasa memperbaiki kinerja badan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai, peningkatan tata tertib dan disiplin pegawai, upaya pemenuhan sarana prasarana, perbaikan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program kerja, perbaikan penyusunan dan pelaksanaan standar operasional pelayanan untuk menjadi lembaga profesional dan mendapat kepercayaan masyarakat.

**2. Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal.**

Misi ini mengandung makna bahwa Badan Keuangan Daerah bertekad untuk mewujudkan Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi yang dimiliki dan meningkatkannya secara optimal dengan cara meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan yang sudah ada, pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan baru, pemenuhan sarana-prasarana penunjang kegiatan pelayanan, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait, serta dengan meningkatkan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak/retribusi.

**3. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel**

Misi tersebut mengandung makna bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Depok bertekad untuk mengelola keuangan dan aset Pemerintah Kota Depok berdasarkan prinsip dan peraturan yang berlaku sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan selanjutnya dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya.

Sehubungan dengan telah disusunnya Perubahan RPJMD Kota Depok Tahun 2016 – 2021 dan sesuai dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 maka Misi Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Misi Kota. Sehingga pada Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2016 – 2021 dilakukan perubahan misi sesuai dengan Misi Kota Depok sebagai berikut :

<b>MISI BADAN KEUANGAN DAERAH</b>	
<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Sesudah Perubahan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membangun dan Mengembangkan BKD menjadi Lembaga yang Profesional</li><li>2. Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal</li><li>3. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan</li><li>2. Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan</li></ol>

### **2.1.3. TUJUAN**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis yang dihadapi. Tujuan yang akan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategis serta kemampuan sumber daya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun Renstra Badan Keuangan Daerah. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Depok pada Tahun 2016-2021 berdasarkan misi yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Membangun dan Mengembangkan BKD menjadi Lembaga yang Profesional

Tujuan :

1. Mewujudkan BKD yang profesional dengan pelayanan prima
2. Mewujudkan kinerja BKD yang optimal dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai yang diamanatkan

Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal

Tujuan :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan pendapatan dengan peningkatan secara berkelanjutan

Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel

Tujuan :

1. Mewujudkan penganggaran yang efektif dan efisien berorientasi pada pelayanan publik
2. Mewujudkan APBD tepat waktu
3. Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab
4. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang komprehensif, efektif dan efisien
5. Mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian

Berdasarkan hasil reuiu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Tujuan pada Perubahan Renstra BKD, maka dilakukan perubahan sebagai berikut :

<b>TUJUAN BADAN KEUANGAN DAERAH</b>	
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
<p>MISI I : Membangun dan Mengembangkan BKD menjadi Lembaga yang Profesional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan BKD yang profesional dengan pelayanan prima</li> <li>2. Mewujudkan kinerja BKD yang optimal dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai yang diamanatkan</li> </ol>	<p>MISI I : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang Profesional dan Transparan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah</li> </ol>
<p>MISI II : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mewujudkan optimalisasi penerimaan pendapatan dengan peningkatan secara berkelanjutan</li> </ol>	<p>MISI III : Mengembangkan Ekonomi yang Kokoh dan Berkeadilan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah</li> </ol>
<p>MISI III Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan penganggaran yang efektif dan efisien berorientasi pada pelayanan publik</li> <li>2. Mewujudkan APBD tepat waktu</li> <li>3. Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab</li> <li>4. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang komprehensif, efektif dan efisien</li> <li>5. Mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian</li> </ol>	

#### **2.1.4. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sasaran dan indikator kinerja sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Depok pada Tahun 2016-2021 berdasarkan misi yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Membangun dan Mengembangkan BKD menjadi Lembaga yang Profesional

Sasaran :

1. Meningkatnya standar pelayanan publik, dengan indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan pajak daerah
2. Meningkatnya kualitas manajemen BKD, dengan indikator kinerja sasaran Predikat SAKIP BKD

Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal

Sasaran :

Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan secara berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran : a). Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah ; b). Persentase rata-rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ; c). Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target pada tahun berjalan.

Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel

Sasaran :

1. Meningkatnya efektifitas dalam pengelolalan APBD, dengan indikator kinerja sasaran Alokasi anggaran belanja modal terhadap total belanja APBD

2. Meningkatnya disiplin waktu penyusunan dan pelaksanaan APBD dengan indikator kinerja sasaran Tersusunnya APBD tepat waktu
3. Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah, dengan indikator kinerja sasaran Terlayannya pelayanan perbendaharaan
4. Meningkatnya tata kelola aset, dengan indikator kinerja sasaran : a). Persentase aset tercatat ; b). Persentase bidang tanah pemerintah bersertifikat ; c). Jumlah bidang yang dimanfaatkan ; d). Jumlah luas RTH yang diamankan per tahun
5. Meningkatnya disiplin waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan dengan indikator kinerja sasaran : a). Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ; b). Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Depok

Berdasarkan hasil reuiu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Berikorasi terhadap Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran pada Perubahan Renstra BKD, maka telah dilakukan perubahan sebagai berikut :

<b>SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH</b>			
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Sesudah Perubahan</b>	
<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>
MISI I : Membangun dan Mengembangkan BKD menjadi Lembaga yang Profesional		MISI I : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang Profesional dan Transparan	
1. Meningkatnya standar pelayanan publik  2. Meningkatnya kualitas manajemen BKD	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan pajak daerah  1. Predikat SAKIP BKD	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah  2. Meningkatnya kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan	1. Opini BPK  1. Predikat SAKIP BKD 2. Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pembayaran Pajak Daerah
MISI II : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal		MISI III : Mengembangkan Ekonomi yang Kokoh dan Berkeadilan	
Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan secara berkelanjutan	1. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah 2. Persentase rata-rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3. Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target pada tahun berjalan.	Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD	Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD
MISI III Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel			
1. Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan APBD 2. Meningkatnya disiplin waktu penyusunan dan pelaksanaan APBD	1. Alokasi anggaran belanja modal terhadap total belanja APBD 1. Tersusunnya APBD secara tepat waktu		



<p>3. Meningkatnya Profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah</p> <p>4. Meningkatnya tata kelola asset</p> <p>5. Meningkatnya disiplin waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan</p>	<p>1. Terlayannya pelayanan perbendaharaan</p> <p>1. Persentase aset tercatat</p> <p>2. Persentase bidang tanah pemerintah bersertifikat</p> <p>3. Jumlah bidang yang dimanfaatkan</p> <p>4. Jumlah luas RTH yang diamankan per tahun</p> <p>1. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan</p> <p>2. Opini BPK atas laporan keuangan</p>		
---	--	--	--

### **2.1.5. STRATEGI , KEBIJAKAN DAN PROGRAM**

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan, dirancang strategi dan kebijakan yang dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kota Depok secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut harus berpedoman kepada strategi dalam RPJMD Kota Depok. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian ditetapkan program – program yang akan dilaksanakan.

Adapun strategi dan kebijakan serta program yang akan dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kota Depok sampai dengan tahun 2018, yaitu :

Misi 1 : Membangun dan Mengembangkan BKD menjadi Lembaga yang Profesional  
Strategi dan Kebijakan :

1. Mengembangkan pelayanan secara transparan dan terstandarisasi ; dengan kebijakan Menyusun standar dan prosedur pelayanan prima.
2. Mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi; dengan kebijakan Membangun sistem yang terintegrasi baik di dalam maupun dengan perangkat daerah terkait.
3. Meningkatkan kualitas SDM; dengan kebijakan Meningkatkan kompetensi aparatur BKD.
4. Meningkatkan sarana prasarana aparatur, administrasi perkantoran, kualitas kelembagaan serta kualitas data dan perencanaan ; dengan kebijakan
  - a. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran dan sarana serta prasarana aparatur
  - b. Meningkatkan akuntabilitas manajemen BKD

Untuk membangun dan mengembangkan BKD menjadi lembaga yang profesional, dilaksanakan melalui program:

1. Peningkatan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik
6. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan
7. Pengembangan Layanan Teknologi Informatika

Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal

Strategi dan Kebijakan :

Optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak retribusi dan lain – lain PAD yang Sah; dengan kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan pajak, retribusi dan lain lain PAD yang sah.

Untuk mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang Optimal dilaksanakan melalui program :

Peningkatan Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel

Strategi / Kebijakan :

1. Meningkatkan alokasi belanja modal yang produktif untuk kepentingan publik; dengan kebijakan:
  - a. Menurunkan proporsi belanja pegawai dan barang jasa
  - b. Meningkatkan kualitas penyusunan RKA / DPA
2. Meningkatnya koordinasi dengan pihak pihak terkait dan sinergi penyusunan anggaran TAPD – Badan Anggaran; dengan kebijakan Peningkatan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam penyusunan anggaran
3. Menyempurnakan sistem dan prosedur perbendaharaan dan penatausahaan keuangan dengan kebijakan Mewujudkan pelayanan yang cepat dan prima
4. Meningkatkan pengelolaan aset daerah; dengan kebijakan Optimalisasi penatausahaan, pemanfaatan serta pengamanan aset daerah

5. Meningkatnya koordinasi penyusunan laporan keuangan dengan OPD terkait secara intensif, cepat dan tepat ; dengan kebijakan Meningkatkan validitas dan reliabilitas laporan keuangan

Untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dilaksanakan melalui program :

1. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah
3. Pengamanan dan Penertiban Aset RTH

Berdasarkan hasil reviu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Berikorasi terhadap Strategi dan Arah Kebijakan pada Perubahan Renstra BKD, maka dilakukan perubahan sebagai berikut :

<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KEUANGAN DAERAH</b>			
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Sesudah Perubahan</b>	
<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
MISI I : Membangun dan Mengembangkan BKD menjadi Lembaga yang Profesional		MISI I : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang Profesional dan Transparan	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pelayanan secara transparan dan terstandarisasi</li> <li>2. Mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi</li> <li>3. Meningkatkan kualitas SDM</li> <li>4. Meningkatkan sarana prasarana aparatur, administrasi perkantoran, kualitas kelembagaan, serta kualitas data dan perencanaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun standar dan prosedur pelayanan prima</li> <li>1. Membangun sistem yang terintegrasi baik di dalam maupun dengan OPD terkait</li> <li>1. Meningkatkan kompetensi aparatur BKD</li> <li>1. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran dan sarana serta prasarana aparatur</li> <li>2. Meningkatkan akuntabilitas manajemen BKD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah</li> <li>2. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan</li> <li>3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah</li> <li>2. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan</li> <li>3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan</li> </ol>
MISI II : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal		MISI III : Mengembangkan Ekonomi yang Kokoh dan Berkeadilan	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi dan lain – lain PAD yang Sah</li> </ol>	Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan pajak , retribusi dan lain – lain PAD yang Sah	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
MISI III : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan alokasi belanja modal yang produktif untuk kepentingan pelayanan publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan proporsi belanja pegawai dan barang jasa</li> <li>2. Meningkatkan kualitas</li> </ol>		

<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KEUANGAN DAERAH</b>			
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Sesudah Perubahan</b>	
<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak pihak terkait dan sinergi penyusunan anggaran TAPD – Badan Anggaran 3. Menyempurnakan sistem dan prosedur perbendaharaan dan penatausahaan keuangan 4. Meningkatkan pengelolaan aset daerah 5. Meningkatkan koordinasi penyusunan laporan keuangan dengan OPD terkait secara intensif , cepat dan tepat	penyusunan RKA / DPA 1. Peningkatan koordinasi dengan pihak pihak terkait dalam penyusunan anggaran  1. Mewujudkan pelayanan yang cepat dan prima  1. Optimalisasi penatausahaan, pemanfaatan serta pengamanan aset daerah  1. Meningkatkan validitas dan reabilitas laporan keuangan		

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja pemberi amanah serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Badan Keuangan Daerah Kota Depok pada Tahun 2018 telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja berikut target kinerja yang akan dicapai serta program dan kegiatan berikut alokasi anggaran yang akan dilaksanakan melalui Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018			
BADAN KEUANGAN DAERAH			
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya standar pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan pajak daerah	A
2	Meningkatnya kualitas manajemen BKD	Predikat SAKIP BKD	B
3	Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan secara berkelanjutan	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	36,59%
		Persentase rata-rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9,84%
		Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target pada tahun berjalan	100%
4	Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan APBD	Alokasi anggaran belanja modal terhadap total belanja APBD	39,50%
5	Meningkatnya disiplin waktu penyusunan dan pelaksanaan APBD	Tersusunnya APBD secara tepat waktu	Tepat waktu
6	Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah	Terlayannya pelayanan perbendaharaan	100%
7	Meningkatnya tata kelola aset	Persentase aset tercatat	100%
		Persentase bidang tanah pemerintah bersertifikat	8,00%
		Jumlah bidang yang dimanfaatkan	30 bidang
		Jumlah luas RTH yang diamankan per tahun	1,5 Ha
8	Meningkatnya disiplin waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat waktu
		Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Depok	WTP
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Rp 2.149.500.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 675.500.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
III	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Rp 841.150.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-1
IV	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 80.000.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
V	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Rp 39.000.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
VI	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 1.565.750.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-4,5,6 dan 8
VII	Program Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Rp 1.707.084.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-1
VIII	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Rp 2.432.000.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-3
IX	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Rp 897.360.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-7
X	Program Pengamanan dan Penertiban Aset RTH	Rp 485.180.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-7
	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	<b>Rp 10.872.524.000,00</b>	



Pada APBD Perubahan Tahun 2018, Anggaran Badan Keuangan Daerah bertambah menjadi Rp. 11.211.704.142,00. Terdapat penambahan anggaran pada 6 (enam) program dan pengurangan anggaran pada 1 (satu) program dengan jumlah total anggaran sebesar . Oleh karena itu dilakukan peyesuaian terhadap perjanjian kinerja melalui Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018			
BADAN KEUANGAN DAERAH			
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya standar pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan pajak daerah	A
2	Meningkatnya kualitas manajemen BKD	Predikat SAKIP BKD	B
3	Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan secara berkelanjutan	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	36,59%
		Persentase rata-rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9,84%
		Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target pada tahun berjalan	100%
4	Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan APBD	Alokasi anggaran belanja modal terhadap total belanja APBD	39,50%
5	Meningkatnya disiplin waktu penyusunan dan pelaksanaan APBD	Tersusunnya APBD secara tepat waktu	Tepat waktu
6	Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah	Terlayannya pelayanan perbendaharaan	100%
7	Meningkatnya tata kelola aset	Persentase aset tercatat	100%
		Persentase bidang tanah pemerintah bersertifikat	8,00%
		Jumlah bidang yang dimanfaatkan	30 bidang
		Jumlah luas RTH yang diamankan per tahun	1,5 Ha
8	Meningkatnya disiplin waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat waktu
		Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Depok	WTP
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Rp 2.249.491.500,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 794.500.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
III	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Rp 172.390.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
IV	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 1.621.030.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-4,5,6 dan 8
V	Program Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Rp 1.839.802.642,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-1
VI	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Rp 2.220.400.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-3
VII	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Rp 907.760.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-7
	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	<b>Rp 9.805.374.142,00</b>	

Dari Dokumen Perjanjian Kinerja di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018, Badan Keuangan Daerah Kota Depok telah menetapkan 8 sasaran strategis, 14 indikator kinerja sasaran berikut target kinerja yang akan dicapai melalui 10 program dan 40 kegiatan dengan alokasi anggaran total sebesar Rp Rp. 11.211.704.142,00.

Mengacu kepada hasil reviu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Perubahan Renstra BKD, maka telah dilakukan perbaikan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018			
BADAN KEUANGAN DAERAH			
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik	Predikat Sakip BKD	B
		Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pembayaran pajak daerah	Sangat Baik
3	Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD	Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD	76,21%
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Rp 2.149.500.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 675.500.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
III	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Rp 841.150.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
IV	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 80.000.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
V	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Rp 39.000.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
VI	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 1.565.750.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-1
VII	Program Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Rp 1.707.084.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
VIII	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Rp 2.432.000.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-3
IX	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Rp 897.360.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-1
X	Program Pengamanan dan Penertiban Aset RTH	Rp 485.180.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-1
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp 10.872.524.000,00</b>	

Adapun untuk Perjanjian Kinerja Perubahan sesuai dengan penambahan anggaran pada APBD Perubahan adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018			
BADAN KEUANGAN DAERAH			
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik	Predikat Sakip BKD	B
		Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pembayaran pajak daerah	Sangat Baik
3	Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD	Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD	76,21%
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Rp 2.249.491.500,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 794.500.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
III	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Rp 172.390.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
IV	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 1.621.030.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-1
V	Program Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Rp 1.839.802.642,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
VI	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Rp 2.220.400.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-3
VII	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Rp 907.760.000,00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-1
	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	<b>Rp 9.805.374.142,00</b>	